



Awal 2016, Pemkab Targetkan Tutup Galian C Bodong ✓

Amlapura (Bali Post) -

Pemkab Karangasem menargetkan menutup total seluruh lokasi galian C tanpa izin alias bodong, pada awal tahun 2016. Langkah tegas ini dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, akibat aktivitas galian C yang semakin tidak terkendali di wilayah yang tidak diperbolehkan. Sebelum menutup, sosialisasi akan terus dilakukan agar masyarakat maupun pengusaha tidak kaget dan mempersiapkan diri mencari pekerjaan lain atau melakukan galian di lokasi yang diperbolehkan pemerintah daerah.

Penegasan itu disampaikan Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi, saat dihubungi Rabu (11/11) kemarin. Ia menyampaikan temuan dan rekomendasi BPK harus dijalankan, karena galian C tak berizin memang harus ditutup. Namun, karena masih dalam momen pilkada, terlebih Karangasem masuk dalam

zona merah, pihaknya kemudian meminta Satpol PP bersama instansi terkait lainnya di dalam Tim Yustisi memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha.

Sekda mengakui, langkah tegas pemerintah daerah ini akan sulit diterima warga maupun pengusaha. Namun, aturan memang harus ditegakkan. Sebab, galian C tak berizin jelas melanggar perda. Apalagi, melakukan galian di wilayah yang sudah tidak diperbolehkan, seperti di Kecamatan Rendang, Selat, dan beberapa wilayah di Kecamatan Bebandem. "Awal tahun depan penutupan akan dilakukan bertahap. Di Kecamatan Rendang, Selat dan Bebandem, sudah tidak boleh lagi ada galian C," tegasnya.

Bagi para pengusaha maupun warga lainnya, Sekda Adnya Mulyadi menyarankan agar menghentikan usaha galian C tanpa izin di tiga kecamatan itu dan beralih ke

tempat yang memang diperbolehkan pemerintah daerah, seperti di Kecamatan Kubu. Saat ini masih ada sekitar 41 pengusaha yang masih melakukan galian C tanpa izin. Sementara, warga setempat, mayoritas melakoni pekerjaan sebagai buruh di sekitar lokasi galian C. Disinggung langkah ini menimbulkan reaksi keras baik dari pengusaha maupun warga setempat, Sekda mengaku memahaminya. Pasalnya, lokasi galian C sudah menjadi pekerjaan warga sehari-hari. Namun, pemerintah daerah juga tidak bisa membiarkan kerusakan lingkungan terus terjadi, karena melakukan galian melewati batas kedalaman maksimal.

Pihaknya berharap, dengan penutupan galian C tanpa izin ini, lahan yang sudah dikeruk dapat direklamasi lagi. Kemudian dijadikan lokasi pusat pengembangan tanaman organik. (kmb31)

Edisi : Kamis, 12 November 2015

Hal : 13



Didominasi Belanja Aparatur

Dewan Minta RAPBD Badung Dikaji Ulang

Mangupura (Bali Post) –
Postur Rancangan APBD (RAPBD) Badung 2016 ternyata lebih banyak diserap untuk belanja aparatur dibandingkan belanja publik. Bahkan, belanja aparatur atau pegawai meningkat Rp 157 miliar lebih dari Rp 1.183.701.925.743,68 pada APBD 2015 menjadi Rp 1.340.824.091.324,08 pada RAPBD 2016. Sedangkan belanja publik anjlok drastis hingga Rp 47 miliar dari Rp 2.343.501.293.674,26 tahun 2015 menjadi Rp 2.295.583.398.565,56 pada 2016.

Tingginya belanja pegawai tersebut, mengundang reaksi wakil rakyat di DPRD Badung. Mereka menilai timpangnya antara belanja aparatur dan publik harus diubah. "Semestinya idealnya belanja publik lebih besar daripada belanja aparatur," ujar anggota Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata, Rabu (11/11) kemarin.

Menurutnya, pihaknya akan kembali melakukan kajian. Sebab, APBD 2016 masih dalam tahap pembahasan, sehingga masih ada kesempatan untuk mengubah. "Komposisi belanja aparatur lebih besar daripada publik sangat tidak ideal. Apa pun yang terjadi, komposisi belanja publik ini harus tetap diperhatikan,"

terangnya.

Dia berpandangan, belanja publik bisa lebih besar daripada aparatur, asalkan pemerintah jeli. Misalnya, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) diarahkan pada belanja publik. "Pegawai harus tetap sejahtera, tetapi jangan sampai rakyat dikorbankan," tegasnya.

Ketua Komisi III Nyoman Satria juga mengaku heran dengan ulah eksekutif yang terus menaikkan belanja aparatur.

Misalnya, anggaran tambahan penghasilan pegawai mencapai Rp 400 miliar lebih. Sebab, tambahan penghasilan pegawai sudah cukup besar pada 2015, yakni Rp 300 miliar. "Tidak ada parameter jelas eksekutif dalam menaikkan belanja pegawai. Apakah kenaikan dolar, atau

kinerja pegawai yang dijadikan acuan," ucapnya.

Dia juga menilai eksekutif tidak pernah memaparkan secara detail dasar kenaikan belanja pegawai. Karena itu, dewan sepakat mengkaji dan menelusuri apa yang dijadikan dasar eksekutif untuk menaikkan belanja aparatur. "Terus

terang kami di Dewan juga heran, kok bisa terus eksekutif menaikkan belanja untuk dirinya sendiri," katanya.

Dia mengaku akan menelusuri ketimpangan tersebut. Pasalnya, politisi asal Mengwi

ini menaruh curiga pada sikap eksekutif yang terus menaikkan penghasilan mereka. "Kami akan telusuri ada apa di balik ini," ucapnya singkat.

Pembahasan APBD 2016 terancam molor. Pasalnya, hingga saat ini penjabat bupati belum mengirim berkas pendukung pembahasan RAPBD. Termasuk, peraturan bupati (perbup) tentang kenaikan tambahan penghasilan pegawai. Sanksi dari molornya APBD ini adalah tidak cairnya gaji selama enam bulan berturut-turut. (kmb27)



Alit Yandinata dan Nyoman Satria

Bali Post/par

Edisi : Kamis, 12 November 2015

Hal : 3



Regulasi Pengadaan Mobdin Tak Ada DPRD Terima Bansos Utuh 2016

Singaraja (Bali Post) -

Rencana pengadaan 29 unit mobil dinas (mobdin - red) untuk anggota dewan tahun 2016 mendarat akhirnya batal. Pembatalan ini karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang pembelian mobdin itu. Karena itu, anggaran dana bantuan sosial (bansos - red) yang sebelumnya dipangkas untuk membeli mobdin, dipastikan diterima utuh tahun depan. Dari APBD 2016 bansos dialokasikan Rp 500 juta untuk masing-masing anggota dewan.

Dari informasi yang dihimpun Rabu (11/11) kemarin, pengadaan mobdin untuk dewan ini diwacanakan sejak Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan KUA-PPAS. Ketika itu, dewan mengusulkan membeli 29 unit mobdin tahun 2016. Lantaran kesulitan anggaran, dewan pun merelakan anggaran bansos mereka dipangkas untuk pembelian mobdin. Saat anggaran dibahas, dewan sempat meminta penjelasan terkait regulasi pembelian mobdin ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 2015. Hasilnya, Kemendagri menyatakan pemerintah belum menerbitkan regulasi yang mengatur pemberian fasilitas mobdin untuk anggota dewan.

Wakil rakyat asal Buleleng pun diingatkan agar tidak mengang-

garkan pembelian mobdin itu. Kemendagri juga mengingatkan, lembaga dewan jangan mudah terpengaruh atau mengikuti keinginan beberapa kabupaten lain, lantaran keuangan mendukung memaksa membeli mobdin.

Atas hasil koordinasi itu, lembaga dewan memutuskan membatalkan rencana pembelian mobdin 2016 mendarat. Usulan yang semula gencar dibahas di gedung dewan, akhirnya kandas di tengah jalan. Hingga Rancangan APBD Buleleng 2016 mulai kemarin dibahas usulan pembelian mobdin dihapuskan.

Mobdin Dibatalkan

Ketua DPRD I Gede Supriatna didampingi Kabag Humas Putra Aryana membenarkan usulan pembelian mobdin anggota dewan telah dibatalkan. Sikap dewan ini sesuai hasil

koordinasi dan memerhatikan petunjuk Kemendagri yang melarang pemerintah daerah menganggarkan pembelian mobdin. Alasannya, tidak ada regulasi yang jelas.

Supriatna pun telah menyampaikan kepada seluruh anggotanya. Dia mengharapkan, diskusi atau pandangan terkait rencana pembelian mobdin tidak lagi dimunculkan. Soalnya, sudah jelas tidak ada regulasi yang mengatur. Sesuai PP No. 24 tahun 2006, perubahan ke-2 PP No. 37 tahun 2006 dan PP No. 21 tahun 2007 tentang Kedudukan dan Protokol dan Keuangan Anggota DPRD, diatur fasilitas mobdin dan rumah dinas diberikan kepada unsur pimpinan DPRD. Anggota dewan tak berhak atas fasilitas mobdin.

Dalam pembahasan Rancangan APBD ini anggotanya fokus mem-

bahas anggaran untuk melanjutkan pembangunan Buleleng. "Saya kira sudah jelas rencana pembelian mobdin yang semula diusulkan kawan-kawan itu batal. Karena tidak ada regulasi yang mengatur soal itu. Buat apa lembaga terus memperbincangkan itu. Lebih baik kita fokus bahas anggaran pembangunan ke depan," tegasnya.

Bupati Agus Suradnyana usai sidang paripurna membenarkan rencana pembelian mobdin dewan dibatalkan. Pembatalan ini bukan karena eksekutif tidak setuju usulan dewan itu, tetapi karena tidak ada dasar hukum, pihaknya tidak ingin memaksakan. Jika rencana ini dipaksakan sangat berisiko menimbulkan persoalan di kemudian hari. "Karena tidak ada dasar hukum membeli mobdin itu, saya harap keputusan ini dihormati," pinta Bupati PAS setetuju Sekkab Puspaka. (kmb38)



Ketua DPRD Buleleng
Gede Supriatna

Bali Post/kmb38



Bupati Buleleng
Putu Agus Suradnyana

Bali Post/km b38

Edisi : Kamis, 12 November 2015

Hal : 11



Sidang Korupsi LPD Sinabun ✓ Terdakwa Akui Buat Laporan Fiktif

Denpasar (Bali Post) -

Setelah memeriksa saksi meringankan, terdakwa I Gusti Nyoman Sutapa alias Gusti Topong (53) selaku Ketua LPD Sinabun, Sawan, Buleleng, Rabu (11/11) kemarin langsung diperiksa sebagai terdakwa. Terdakwa yang dituding atas dugaan korupsi hingga Rp 1,9 miliar itu, mengakui kesalahannya. Dia salah karena membuat laporan fiktif.

Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Made Suardika, di hadapan majelis hakim diketuai Edward Harris Sinaga mengaku dirinya sering membuat laporan agar seimbang. Selain itu, terdakwa juga mengaku meminjam hingga Rp 1,5 miliar. "Ya, totalnya ada Rp 1,5 miliar," sebutnya di depan

persidangan.

Lantas, ke mana uang tersebut? Gusti Topong mengatakan, uang itu dia gunakan untuk membuat usaha bata merah. Hanya, usahanya tidak berhasil, dengan dalih tidak ada yang melanjutkan mencetak bata merah. Selain itu, pembelinya juga lagi sepi. Sedangkan usaha ayam broilernya ikut kolaps. Terdakwa mengatakan, ayam broilernya mati sebelum panen. Selain untuk usaha, terdakwa mengakui ada pembelian tanah Rp 300 juta, dengan luas 6 are.

Atas pengakuan kesalahan terdakwa itu, majelis hakim memberikan kesempatan pada jaksa untuk membuat tuntutan. Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa dijelaskan uang pinjaman dari LPD

digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kredit Rp 460 juta, untuk usaha bata Rp 300 ribu, sewa kontrak tanah usaha bata merah selama 4 tahun dengan rincian per tahun Rp 30 juta. Juga membeli sebidang tanah seluas 6 are Rp 300 juta, usaha ayam broiler Rp 20 juta, membayar sisa bagian utang Rp 30 juta, biaya kebutuhan sehari-hari Rp 30 juta, membangun rumah Rp 160 juta, membayar tabungan wajib Rp 26,5 juta, membayar pokok pinjaman Rp 3,5 juta dan membayar administrasi Rp 75 ribu. Atas dasar itulah, diketahui terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah merugikan keuangan negara atau LPD Sinabun Rp 1, 9 miliar. (kmb37)

Edisi : Kamis, 12 November 2015

Hal : 3



Sulit Terwujud, Dana Bagi Hasil dari Pariwisata

Denpasar (Bali Post) -

Tuntutan dana bagi hasil dari pariwisata terkait gagasan DPRD Bali untuk merevisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dinilai akan sulit terwujud. Pasalnya, devisa dari wisatawan yang datang ke Bali tidak menjadi penerimaan negara secara langsung. Bali hanya menyumbang pendapatan dari *Visa on Arrival* (VoA) dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Target PNBP dalam APBN 2015 Rp 3,5 triliun. Jika diasumsikan 40 persen wisatawan mancanegara datang ke Bali, maka PNBP yang bersumber dari wisatawan yang berkunjung ke Bali Rp 1,4 triliun," ujar anggota DPRD-RI Dapil Bali I Wayan Koster dalam rapat kerja DPRD Bali dengan Gubernur, anggota DPR dan DPD-RI dapil Bali, bupati/wali kota se-Bali dan Ketua DPRD se-Bali, Rabu (11/11) kemarin.

Koster melanjutkan, dana itu pun penggunaannya dikembalikan lagi ke pihak Imigrasi sebagai dana peningkatan dan pengembangan keimigrasian. Sementara devisa yang pada tahun 2014 ditafsir Rp 59 triliun, sudah diterima pengusaha hotel, pemilik restoran, penerbangan, pengusaha jasa, pedagang dan masyarakat. Pemer-



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 08.100.400.391, (0361) 819446

intah daerah juga sudah menerima dari pajak hotel dan restoran. "Meminta hak dana bagi hasil dari pariwisata untuk Bali, tidak bisa dilakukan. Sebab, pariwisata bukan sektor primer yang berbeda dengan non-klatur sumber daya alam. Pendapatan negara dari visa pada sektor pariwisata merupakan PNBP yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM, tidak dikelola Menteri Keuangan, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai hasil yang dapat dibagi untuk daerah," tegas anggota Badan Anggaran DPR-RI ini.

Koster menambahkan, Bali

telah menerima dana transfer daerah dan dana desa Rp 8,26 triliun. Dana ini sudah termasuk komponen yang bersumber dari pajak penghasilan perorangan (PPh), pajak penghasilan badan (PPh badan) dan lainnya. "Jadi dengan dapat dana Rp 6,26 triliun, Bali sebenarnya juga disubsidi daerah lainnya," jelasnya.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika tetap menginginkan adanya revisi UU No. 33 Tahun 2004. Diharapkan, ada keadilan melalui elaborasi yang lebih jauh terkait sumber daya lainnya. "Contohnya, Kalimantan Timur karena dia punya minyak, gas dan segala macam, itu APBD-nya Rp 15 triliun. Penduduknya sama dengan kita, 4 juta. Kita penduduknya sama, tamunya banyak, tetapi kita cuma mampu Rp 5 triliun, jauh sekali kan," ujarnya.

Selama ini, lanjut Pastika, pihaknya terpaksa mengurangi anggaran yang lain seperti infrastruktur untuk membiayai pelestarian adat, budaya dan lingkungan. Hal itu merupakan bagian dari beban moral Bali sebagai jendela dan *showroom*-nya



Bali Post/kmb23

GABUNGAN - Suasana rapat gabungan anggota DPR-RI, DPD-RI, Gubernur Bali, bupati dan wali kota bersama anggota DPRD Provinsi dan DPRD se-Bali membahas UU Perimbangan, Rabu (11/11) kemarin di kantor DPRD Bali.

Indonesia. "Di situ persoalannya. Supaya tetap tampil cantik, ada biaya kosmetik, itu kira-kira. Semua pada intinya kita ingin Bali mendapatkan hak yang lebih adil. Tanpa bermaksud kita mengecilkan daerah lain, tetapi Bali punya tanggung jawab tersendiri sebagai jendelanya Indonesia, sebagai *showroom*-nya Indonesia, itu yang penting," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menambahkan, Bali sebagai daerah tujuan pariwisata sudah sepatutnya mengenakan *cultural heritage* dan *environmental donation* kepada para wisatawan asing. Seperti yang telah dilakukan 9 negara di dunia, termasuk di dalamnya Prancis, Jepang dan Cina. "Jadi, kita bukan merengek-rengok ke pusat, melainkan memperjuangkan hak kita," tegasnya. (kmb32)